



Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja

Stevani Sitilan¹, Hasniati²

¹Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, stevanisitilan@gmail.com

²Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, hasniati@unhas.ac.id

Corresponding Author: stevanisitilan@gmail.com¹

Abstract: *Community participation in disaster mitigation is crucial to improving resilience and reducing risk in landslide-prone areas such as Tana Toraja. The vulnerable geographical conditions make community involvement even more crucial. According to Cohen and Uphoff, participation includes community involvement in the planning process, decision-making, program implementation, and contribution of resources to specific activities. Based on this theory, several problems remain, such as a lack of community involvement in planning, low active participation in training and simulations, and minimal involvement in disaster mitigation evaluations. This study uses a qualitative approach with a descriptive method, focusing on four aspects of participation according to Cohen and Uphoff: decision-making, implementation, benefits, and evaluation. The results show that the community has participated quite well, especially in the aspects of implementation and benefit acceptance, although improvements in other aspects are still needed.*

Keyword: *Participation, disaster mitigation, landslides.*

Abstrak: Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi risiko di wilayah rawan longsor seperti Tana Toraja. Kondisi geografis yang rentan menjadikan keterlibatan masyarakat semakin krusial. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi mencakup keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta kontribusi sumber daya dalam kegiatan tertentu. Berdasarkan teori tersebut, masih terdapat beberapa permasalahan, seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, rendahnya partisipasi aktif dalam pelatihan dan simulasi, serta minimnya keterlibatan dalam evaluasi mitigasi bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, berfokus pada empat aspek partisipasi menurut Cohen dan Uphoff: pengambilan keputusan, implementasi, manfaat, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berpartisipasi cukup baik terutama pada aspek implementasi dan penerimaan manfaat, meskipun peningkatan pada aspek lainnya tetap diperlukan.

Kata Kunci: Partisipasi, mitigasi bencana, longsor.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk untuk menyukseskan pembangunan di Indonesia ialah dengan melakukan mitigasi bencana. Pasal 1 (9) UU No. 24 Tahun 2007 mitigasi bencana didefinisikan sebagai “upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Adapun tercantum dalam Pasal 47 (2) kegiatan mitigasi bencana mencakup, pelaksanaan penataan ruang; pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Selain itu, penanggulangan bencana, yang mencakup serangkaian upaya mulai dari perumusan kebijakan pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana, hingga pelaksanaan tindakan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana (Maulana et al., 2024).

Dalam penanggulangan bencana tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta masyarakat juga penting. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana terbentuk melalui konstruksi sosial yang menggabungkan kenyataan objektif dan subjektif. (Putri, 2023). Pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana ini juga disebut sebagai penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat merupakan upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan diri dari dampak bencana (IDEP, 2007). Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam upaya mitigasi bencana yang efektif dan berkelanjutan (Fauziyah & Kriswibowo, 2023). Paradigma pengelolaan bencana telah mengalami pergeseran signifikan dari pendekatan tradisional yang bersifat reaktif dan top-down menuju pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis komunitas (Nkombi & Wentink, 2022). Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar keterlibatan pasif, tetapi merupakan kontribusi aktif dan sukarela dari masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi strategi pengurangan risiko bencana (Efendi et al., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa integrasi partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana secara signifikan meningkatkan kapasitas adaptif komunitas dan efektivitas program pengurangan risiko bencana (Dera, 2025) (Jefri et al., 2025).

Dalam Peraturan Bupati Tana Toraja No. 62 Tahun 2016 tercantum kegiatan mitigasi bencana yang dapat diupayakan untuk mengurangi resiko bencana, seperti pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Terdapat banyak sekali masyarakat Tana Toraja bertempat tinggal di daerah-daerah rawan akan terjadinya longsor. Mereka memiliki berbagai alasan untuk tetap tinggal meskipun mereka sadar akan besarnya kerawanan bencana yang mereka harus hadapi. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tetap bertahan di daerah rawan bencana longsor karena mereka sudah tinggal bertahun-tahun dari peninggalan/warisan nenek moyang. Melihat kenyataan kehidupan penduduk yang tetap tinggal di sekitar daerah rawan longsor, maka sudah seharusnya mereka mempunyai upaya mitigasi bencana yang tepat. Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana sebagai upaya untuk mengurangi bencana tanah longsor yang dapat dilakukan sebelum bencana itu terjadi, termasuk kesiapan dan tindakan-tindakan pengurangan resiko bencana jangka panjang. Kondisi yang ada di masyarakat adalah terbatasnya pengetahuan tentang mitigasi bencana, reaksi masyarakat terhadap penginformasian bencana masih sangat memprihatinkan karena mereka lebih mengutamakan harta benda dan ternak dibandingkan dengan keselamatan dan kesehatan keluarga.

Upaya mitigasi bencana tersebut bertujuan untuk menggali partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana, baik dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan, maupun evaluasi berbagai kegiatan penanggulangan bencana, dalam hal ini bencana tanah longsor. Kenyataan yang ada, tidak semua anggota masyarakat mau berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi bencana. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya dalam mitigasi bencana merupakan masalah yang harus diselesaikan, mengingat keterlibatan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana tanah longsor cukup efektif pada tingkat lokal.

Tana Toraja memiliki kondisi wilayah dengan dikelilingi oleh pegunungan yang secara geografis terletak di bagian Utara Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah tercatat 2.054,30 km² persegi. Kabupaten Tana Toraja memiliki kondisi topografi dataran tinggi yang dikelilingi oleh pegunungan dengan keadaan lereng gunung yang curam yakni rata-rata kemiringannya diatas 25%. Selain itu Tana Toraja termasuk daerah yang beriklim tropis basah, temperatur suhu rata-rata berkisar antara 15 derajat – 28 derajat celsius dengan curah hujan rata-rata 1500mm/thn sampai lebih dari 3500mm/tahun (Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, 2019). Dengan kondisi wilayah yang telah dijelaskan tersebut beberapa daerah di Kabupaten Tana Toraja selama tiga tahun terakhir seringkali mengalami bencana tanah longsor.

Dampak yang disebabkan oleh tanah longsor yang telah terjadi di Tana Toraja tentunya menimbulkan banyak kerugian secara materiil maupun korban jiwa. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kejadian longsor yang terjadi pada tahun 2024 di Kecamatan Makale mengakibatkan 14 orang meninggal dunia. Adapun kerugian materiil tercatat sebanyak enam unit rumah yang tertimbun material longsor. Akibat dari kejadian ini para tim yang bertugas di lokasi kejadian terkendala peralatan yang masih terbatas dan beberapa titik jalan menuju lokasi tertimbun longsor sehingga proses evakuasi korban terhambat.

Penggunaan lahan yang tidak tepat merupakan salah satu penyebab utama peningkatan kerentanan tanah longsor. Peningkatan kerentanan ini akan semakin parah jika pemerintah daerah dan masyarakat sama sekali tidak menyadari dan tidak tanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah mereka (Rahman, 2015). Partisipasi masyarakat sangat penting dalam hal ini. Partisipasi masyarakat juga merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat berdasarkan rencana awal yang telah dibuat dan disepakati bersama dan menjadi sebuah program (Ulum & Dewi, 2021). Partisipasi merupakan bentuk kepedulian masyarakat untuk mengambil bagian atau peran dalam pembangunan (Cohen & Uphoff, 1980).

Berangkat dari teori tersebut terdapat sejumlah permasalahan dalam partisipasi masyarakat dalam melakukan mitigasi bencana. Seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan mitigasi bencana, dimana pemerintah atau pihak luar sering kali membuat keputusan secara *top-down* tanpa melibatkan masyarakat lokal dalam forum diskusi atau musyawarah. Salah satu penyebab akan terjadinya hal seperti ini karena masyarakat lokal memiliki pengetahuan tradisional tentang daerah rawan bencana berdasarkan pengalaman turun-temurun, namun pengetahuan ini tidak dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, akibatnya keputusan yang telah dibuat tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat sehingga tidak efektif saat terjadi bencana. Permasalahan yang kedua, yaitu dalam pelaksanaan. Rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam mitigasi bencana seperti pelatihan dan simulasi. Permasalahan yang ketiga, yaitu dalam pengambilan manfaat. Ketimpangan dalam penerimaan manfaat dari mitigasi dimana hanya kelompok tertentu (misalnya tokoh adat atau masyarakat yang dekat dengan pemerintah) yang merasakan langsung manfaat dari bantuan atau pelatihan mitigasi sehingga menimbulkan kecemburuan sosial, dan partisipasi dari kelompok yang tidak terjangkau menjadi semakin rendah. Permasalahan yang keempat, yaitu dalam evaluasi. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam evaluasi atau monitoring kegiatan

mitigasi bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan terkait partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana pada daerah rawan longsor di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan menggunakan teori partisipasi masyarakat oleh Cohen dan Uphoff (1980).

Menurut Cohen dan Uphoff partisipasi ialah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan, dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumberdaya atau bekerja sama dalam organisasi atau kegiatan khusus. Sebagai acuan yang terdiri dari partisipasi dalam tahap pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam tahap evaluasi. Berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan mitigasi bencana dapat dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan pendapat dari Cohen dan Uphoff (1980) yang mengemukakan tentang adanya peran dari beberapa pihak yang berpartisipasi yang dapat dikategorikan menjadi penduduk lokal (*local residents*), pemimpin lokal (*local leaders*), aparat pemerintah (*government personel*), dan personel asing (*foreign personel*). Kegiatan mitigasi bencana memerlukan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaannya diharapkan akan mengurangi resiko bencana. Berikut tahapan-tahapan kegiatan pembangunan yang menunjukkan adanya partisipasi publik dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff (1980) :

Secara khusus jenis partisipasi ini berpusat pada pembangkitan ide, penilaian opsi, serta pengambilan keputusan mengenai opsi-opsi tersebut, serta rencana untuk melaksanakan opsi-opsi yang dipilih. Terdapat tiga jenis keputusan yang dimaksudkan dalam tahapan partisipasi ini ; (a) Keputusan awal (*intial decision*) Keterlibatan pada tahap awal ini dapat memberikan informasi yang penting tentang wilayah/daerah dan memberikan berbagai usulan strategi untuk penyelesaian terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam hal keputusan awal, hal-hal yang dapat melibatkan masyarakat seperti, bagaimana upaya tersebut akan dikelola dan pendanaanya, bagaimana bentuk partisipasi dan kontribusi apa yang diharapkan dalam upaya tersebut. (b) Keputusan berkelanjutan (*ongoing decisions*) setelah penetapan program yang akan dilakukan, masyarakat yang tidak terlibat dalam tahap pengambilan keputusan awal, maka akan dilibatkan dalam tahap keputusan berkelanjutan untuk memastikan program seperti apa yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat setempat, (c) Keputusan operasional (*operational decisions*).

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam aspek implementasi sebuah program melalui tiga cara utama ; (a) Kontribusi sumber daya (*resource contributions*) Kontribusi sumber daya dapat mengambil berbagai bentuk, seperti penyediaan tenaga kerja, uang tunai, barang-barang material, dan informasi. Semua masukan tersebut sangat penting bagi program-program yang berupaya untuk memasukkan sumber daya lokal dalam usaha pembangunan. (b) Upaya administrasi dan koordinasi (*administration and co-ordination*) Partisipasi dalam administrasi dan koordinasi program merupakan cara kedua di mana masyarakat dapat terlibat dalam pelaksanaan. (c) Kegiatan Pendaftaran program (*programme enlistment activities*) bentuk partisipasi implementasi yang paling umum adalah melalui pendaftaran dalam program. Tampaknya penting untuk membedakan antara pendaftaran tersebut dan partisipasi dalam manfaat karena pendaftaran tidak selalu menjamin manfaat.

a. Partisipasi Dalam Manfaat (*Participation in Benefits*)

Keterlibatan dalam sebuah program dapat menghasilkan setidaknya tiga jenis manfaat yang mungkin: (1) Materi. Manfaat materi pada dasarnya adalah barang pribadi. (2) sosial. Manfaat sosial pada dasarnya adalah barang publik. (3) pribadi, Manfaat pribadi biasanya sangat diinginkan, meskipun sering kali tidak diperoleh secara individu, melainkan diperoleh anggota kelompok atau sektor karena mereka memperoleh lebih banyak kekuatan sosial dan politik melalui pengoperasian suatu program, tiga hal yang tampak sangat penting dalam manfaat yang ketiga ini, yaitu harga diri, kekuatan politik, dan rasa keberhasilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Creswell (2018) menjelaskan penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mendeskripsikan dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap dari masalah sosial kemanusiaan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, penulis menganggap akan lebih memahami observasi serta pengambilan informasi dan data yang mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana pada Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Makale, Tana Toraja. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan desain penelitian *case studies*, yaitu sebuah desain penelitian kualitatif dimana peneliti mengeksplorasi sebuah kasus, melalui pengumpulan data yang terperinci dan mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi melalui kegiatan observasi, wawancara, perekaman suara, dan dokumen serta laporan yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Creswell & Poth, 2016).

Penelitian ini akan mengeksplorasi kasus bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Dalam menentukan informan penelitian, penulis menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan menggunakan pertimbangan khusus. Pertimbangan yang dimaksud adalah, misalnya seseorang yang tampaknya memiliki pemahaman mendalam terhadap topik penelitian, untuk memfasilitasi penyelidikan subjek penelitian oleh seorang peneliti (Sugiyono, 2016). Adapun yang menjadi informan penelitian ialah orang-orang yang diketahui terlibat langsung, terkait, dan memiliki pemahaman mengenai masalah yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilakukan di salah satu lokasi yang telah terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan dengan lokasi penelitian bertempat di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja.

Untuk menjawab suatu rumusan pertanyaan pada penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang digunakan melingkupi : (a). Observasi, dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pengamatan langsung ke Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana pada daerah rawan longsor di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. (b). Wawancara merupakan komunikasi dua arah yang dilakukan antar dua orang atau lebih yang dilakukan lewat interaksi bertemu secara langsung dengan informan dan melakukan tanya jawab berdasarkan beberapa daftar pertanyaan yang disusun peneliti dengan tujuan untuk memperoleh informasi mendalam. Peneliti menanyakan beberapa hal yang berhubungan dengan pokok permasalahan terkait bagaimana partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana pada daerah rawan longsor di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Dalam melakukan wawancara dengan pemerintah dan masyarakat, peneliti mendengarkan kemudian mempelajari lebih dalam dengan teliti berdasarkan apa yang telah dikemukakan oleh informan. (c). Telaah dokumen dilakukan dengan mencari dan mengkaji dokumen yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat guna untuk menganalisis permasalahan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana dan untuk memperkuat hasil penelitian, sehingga diperoleh data yang asli, lengkap, dan bukan berdasarkan perkiraan, atau dengan mengambil data yang sudah tersedia yang dianggap memiliki relevansi dengan menjadi bahasan yaitu lewat catatan dokumen, bacaan buku, dan jurnal media google scholar, dengan penelusuran dokumen berkaitan dengan partisipasi masyarakat dan mitigasi bencana.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengumpulan data sekunder selanjutnya akan dianalisis secara induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya akan dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan selama proses penelitian berjalan. Teknik analisis data berdasarkan model analisis oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020) yakni : (a). Reduksi data, (b). Penyajian data, dan (c). Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi Dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana mencakup keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait strategi pengurangan risiko bencana.(Nadila & Ratri, 2020). Pada dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, terdapat 3 hal penting dalam sebuah kegiatan atau berjalannya program yang memiliki kaitan erat atas pengimplementasiannya, yaitu keputusan awal, keputusan berkelanjutan, dan pengambilan keputusan operasional yang digunakan sebelum dilaksanakannya sebuah kegiatan. Berjalannya sebuah program yang berbasis masyarakat menurut Cohen dan Uphoff masyarakat harus dilibatkan dalam setiap keputusan-keputusan di dalamnya.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa keterlibatan masyarakat pada segi keputusan awal (*initial decision*) masih tergolong rendah. Wawancara dengan Plt. BPBD Kabupaten Tana Toraja menunjukkan bahwa kegiatan mitigasi masih didominasi oleh pemerintah daerah dan perangkatnya, sedangkan masyarakat hanya mengikuti kegiatan yang sudah dirancang oleh instansi terkait. Hal ini sejalan dengan pernyataan salah satu masyarakat yang mengakui bahwa mereka kurang memahami mekanisme untuk terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, serta merasa keputusan biasanya sudah ditentukan oleh pihak pemerintah. Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai peran mereka dalam mitigasi bencana mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi serta kurangnya ruang partisipatif yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya dalam konteks keputusan berkelanjutan (*ongoing decision*), hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD dan Kelurahan telah melakukan upaya koordinatif dalam merespon kebutuhan masyarakat setelah bencana terjadi. Komunikasi antara BPBD, Lurah, dan Kepala Lingkungan menjadi dasar dalam menentukan bantuan dan penanganan pasca bencana. Namun, hasil wawancara memperlihatkan bahwa masyarakat tidak secara aktif terlibat dalam penentuan langkah-langkah lanjutan. Keputusan mengenai jenis bantuan, prioritas kebutuhan, serta penataan posko pengungsian lebih banyak ditentukan oleh aparat pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun terdapat mekanisme komunikasi lintas instansi, arus informasi masih bersifat top-down, sehingga masyarakat hanya berperan sebagai penerima manfaat, bukan aktor partisipatif dalam penyusunan keputusan berkelanjutan. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan literasi kebencanaan dan pelibatan komunitas dalam fase penanganan bencana.

Dalam pengambilan keputusan operasional (*operational decision*), BPBD Kabupaten Tana Toraja terlihat menjadi aktor utama mengendalikan proses operasional, mulai dari pendataan kebutuhan, mobilisasi sumber daya, hingga pelaksanaan tindakan penanggulangan bersama dinas terkait. Koordinasi dilakukan dengan instansi seperti Dinas Sosial, Puskesmas, dan BASARNAS ketika diperlukan. Temuan ini mengindikasikan bahwa struktur organisasi tanggap bencana di daerah tersebut masih bersifat sentralistik, dengan kewenangan terbesar berada pada BPBD sebagai lembaga resmi pemerintah. Meskipun masyarakat terlibat dalam kegiatan lapangan seperti gotong royong, partisipasi mereka tidak sampai pada tataran pengambilan keputusan operasional seperti pemilihan pemimpin lapangan, pembentukan struktur relawan, atau perumusan strategi teknis penanganan bencana. Akibatnya, masyarakat hanya terlibat pada aspek mobilisasi tenaga, bukan pada aspek perencanaan maupun operasional.

Jika ditinjau dari perspektif teori partisipasi oleh Cohen dan Uphoff, hasil penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan mitigasi bencana menunjukkan bahwa posisi masyarakat di Kelurahan Manggau masih berada pada level pasif, dimana masyarakat hanya terlibat setelah keputusan dibuat oleh pemerintah. Minimnya inisiatif dan keterlibatan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengetahuan tentang kebencanaan, terbatasnya akses informasi, serta persepsi

bahwa pengambilan keputusan merupakan bagian pemerintah. Kondisi ini tentu menjadi hambatan dalam membangun ketangguhan masyarakat, karena partisipasi yang efektif ialah yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam tahapan siklus mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan mekanisme partisipatif dalam sebuah mitigasi dan penanggulangan bencana khususnya di Kelurahan Manggau. Pemerintah daerah perlu mengembangkan program edukasi kebencanaan serta menciptakan ruang dialog yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan sejak tahap perencanaan mitigasi. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga adaptif dan partisipatif, sehingga mampu memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana longsor.

2. Partisipasi Dalam Implementasi

Partisipasi masyarakat merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi program mitigasi dan penanggulangan bencana. Keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari kontribusi sumber daya, keterlibatan dalam administrasi dan koordinasi, serta keterlibatan dalam pendaftaran program, memungkinkan sebuah program berjalan lebih efektif karena dapat mengetahui lebih spesifik kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan rasa memiliki terhadap upaya pengurangan resiko. Rendahnya akses informasi, minimnya ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi hambatan yang mengurangi efektivitas implementasi program. Literatur menegaskan bahwa implementasi yang efektif mensyaratkan pelibatan komunitas sejak pengembangan hingga pelaksanaan, agar program responsif terhadap kebutuhan lokal. (Capital, n.d.)

Partisipasi masyarakat pada implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, partisipasi dalam kontribusi sumber daya, partisipasi dalam administrasi dan koordinasi, dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran program. Berdasarkan data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi partisipasi masyarakat dalam segi kontribusi sumber daya di Kelurahan Manggau menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat setempat dalam penanganan bencana bersifat kuat dan berakar pada budaya lokal. Berdasarkan hasil wawancara, terlihat bahwa tradisi gotong royong telah menjadi norma sosial yang mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif baik dalam kondisi darurat maupun dalam kegiatan rutin seperti kebersihan lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam memberikan tenaga, barang, serta informasi sangat membantu proses penanggulangan bencana, terutama pada tahap awal sebelum instansi resmi tiba di lokasi. Ketika bencana longsor terjadi, masyarakat tidak hanya berperan dalam membuka akses jalan dan membantu korban, tetapi juga menyediakan tempat pengungsian sementara. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sumber daya dari masyarakat bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi elemen utama yang menopang efektivitas respon bencana. Dengan demikian, masyarakat setempat berperan sebagai aktor kunci dan bukan hanya sebagai penerima bantuan, menunjukkan tingginya nilai solidaritas sosial yang menjadi modal penting dalam mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Dari segi administrasi dan koordinasi, peneliti menemukan bahwa masyarakat telah berperan aktif dalam mekanisme pelaporan serta koordinasi jalur evakuasi, meskipun belum menyentuh aspek administrasi program secara terstruktur. Pelaporan tanda-tanda bencana, seperti kondisi hujan ekstrem dan indikasi longsor, dilakukan oleh masyarakat melalui Kepala Lingkungan dan diteruskan kepada pemerintah Kelurahan serta BPPD. Meskipun terdapat kendala jaringan internet pada komunikasi melalui WhatsApp, proses koordinasi tetap berjalan karena adanya kedekatan sosial dan relasi komunikasi langsung antara masyarakat dan aparat pemerintah. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam koordinasi jalur evakuasi menjadi bukti bahwa mereka memahami kondisi geografis wilayah lebih baik dibandingkan instansi luar. Hal ini penting karena pengetahuan masyarakat setempat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan operasi tanggap darurat. Dengan demikian, partisipasi

masyarakat dalam administrasi dan koordinasi dapat dikatakan cukup baik, meskipun masih memerlukan peningkatan dari aspek pengadministrasian. Kedekatan institusi lokal dengan warga memperkuat legitimasi dan efektivitas koordinasi berbasis komunitas, terutama pada fase awal tanggap darurat. (Lestari et al., 2025)

Pada segi pendaftaran program atau keterlibatan masyarakat dalam inisiasi kegiatan mitigasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum terlibat dalam proses administrasi secara resmi, namun aktif dalam kegiatan yang bersifat implementatif. Inisiatif penanaman pohon yang dilakukan oleh Lurah bersama masyarakat merupakan bentuk nyata partisipasi komunitas dalam sebuah langkah mitigasi. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai respon terhadap pengamatan bahwa penyebab longsor bukan hanya curah hujan tinggi, tetapi juga berkurangnya pohon-pohon akibat penebangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai produsen pengetahuan yang dapat mengidentifikasi penyebab dan solusi berbasis lingkungan. Selain itu, kegiatan kerja bakti yang dilakukan setiap Jumat pascalongsor menunjukkan bahwa masyarakat memiliki komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan dan pencegahan resiko bencana secara berkelanjutan. Meskipun belum terlibat pada pendaftaran program, kegiatan ini menggambarkan partisipasi spontan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat dalam program pendidikan dan pelatihan mitigasi bencana merupakan bentuk penting dari keterlibatan komunitas. (Ibrahim et al., 2024)(Astuti et al., 2023)(Rohmah et al., 2023). Partisipasi masyarakat dalam edukasi kebencanaan juga mulai berkembang melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD. Sosialisasi tersebut memberikan pemahaman mengenai tanda-tanda bencana dan langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat untuk meminimalkan resiko. Meski demikian, kemampuan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam bentuk program masih rendah. Dengan kata lain, masyarakat lebih banyak berperan sebagai peserta pelaksana daripada perancang program. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan program mitigasi, khususnya dalam aspek perancangan kegiatan, pemetaan resiko, serta pengajuan kebutuhan secara administratif kepada pemerintah daerah. Dengan adanya peningkatan kapasitas ini, masyarakat dapat lebih mandiri dan aktif dalam mengusulkan program mitigasi secara formal.

Secara keseluruhan, temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Manggau memiliki tingkat keterlibatan tinggi dalam kontribusi sumber daya dan kegiatan lapangan, namun masih terbatas dalam keterlibatan administratif dan perencanaan program mitigasi bencana. Budaya gotong royong dan kepedulian sosial menjadi kekuatan utama yang memungkinkan masyarakat bergerak cepat dalam situasi darurat. Namun, di sisi lain, pelibatan masyarakat dalam aspek formal masih perlu diperkuat agar partisipasi tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga terstruktur dan keberlanjutannya terjamin. Pemerintah daerah dan BPBD memiliki peran strategis untuk menciptakan ruang partisipasi yang lebih terbuka melalui pelatihan, sosialisasi berkelanjutan, dan pendampingan administratif. Dengan pendekatan yang lebih kolaboratif, masyarakat tidak hanya akan menjadi tulang punggung dalam penanganan bencana, tetapi juga rekan/partener dalam perencanaan dan implementasi mitigasi bencana yang berkelanjutan.

3. Partisipasi Dalam Manfaat

Partisipasi masyarakat dalam menerima manfaat dari sebuah program mitigasi maupun penanggulangan bencana merupakan aspek penting yang menentukan efektivitas dari program tersebut. Berdasarkan tinjauan teori menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi tidak hanya dipahami sebagai keterlibatan dalam proses, tetapi juga sebagai keterlibatan dalam menikmati hasil atau manfaat dari suatu program. Dalam konteks mitigasi dan penanggulangan bencana, penerimaan manfaat oleh masyarakat menjadi indikator apakah program tersebut mampu

meningkatkan kesejahteraan maupun ketahanan masyarakat setempat terhadap resiko bencana.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Uphoff dalam Kalesaran (2015), partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga aspek manfaat, yaitu manfaat materi, manfaat sosial, dan manfaat pribadi. Dalam konteks mitigasi dan penanggulangan bencana longsor di Kelurahan Manggau, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga bentuk manfaat tersebut dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pada aspek penerimaan manfaat secara materi, masyarakat terdampak menerima berbagai bantuan fisik yang mendukung stabilitas kehidupan mereka pascabencana. Wawancara dengan masyarakat setempat menunjukkan bahwa bantuan berupa sembako, selimut, tenda pengungsian, obat-obatan, dan dukungan tenaga dari berbagai pihak sangat membantu masyarakat melewati fase darurat bencana. Selain bantuan konsumtif, evakuasi rumah dan perbaikan akses jalan menjadi manfaat materi jangka panjang yang berdampak signifikan terhadap keberlangsungan aktivitas masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manfaat materi yang diterima masyarakat bukan hanya bersifat pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mendukung pemulihan infrastruktur penting yang menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.

Dari segi manfaat sosial, mitigasi dan penanggulangan bencana telah memperkuat hubungan sosial. Sebelum kejadian longsor, interaksi masyarakat sebagian besar terjadi pada acara adat atau kegiatan tertentu saja. Namun, setelah bencana, intensitas komunikasi antarmasyarakat meningkat melalui kegiatan kerja bakti, gotong royong membuka akses jalan, hingga koordinasi dalam kegiatan kebersihan rutin setiap hari Jumat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa solidaritas sosial semakin menguat karena masyarakat merasa memiliki pengalaman bersama yang menyatukan. Selain itu, kehadiran rambu peringatan dan pos keamanan dari BPBD turut memberikan rasa aman yang memupuk kesadaran bersama dalam menjaga dan keselamatan. Kegiatan perbaikan akses jalan juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas publik, sehingga mendorong tumbuhnya kepedulian bersama untuk menjaga hasil kerja tersebut. Secara keseluruhan, manfaat sosial ini menunjukkan bahwa mitigasi bencana menjadi pemicu modal sosial antarmasyarakat.

Sementara itu, pada dimensi manfaat pribadi, masyarakat mendapatkan peningkatan kapasitas dan pengalaman yang secara langsung memengaruhi kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi potensi longsor di masa mendatang. Melalui sosialisasi yang diberikan BPBD, masyarakat mulai memahami langkah-langkah dasar evakuasi dan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca eksterem. Namun, wawancara lapangan juga mengungkap bahwa masyarakat merasa pengetahuan mereka masih terbatas karena belum pernah dilakukan simulasi atau pelatihan praktis terkait pembacaan tanda longsor maupun penentuan jalur evakuasi mandiri. Meskipun demikian, masyarakat tetap merasakan manfaat pribadi dari kegiatan mitigasi, terutama dalam bentuk meningkatnya pengetahuan dasar kebencanaan, keberanian untuk mengambil keputusan darurat, serta tumbuhnya keinginan untuk lebih siap menghadapi bencana. Selain aspek pengetahuan, manfaat pribadi juga berkaitan dengan peningkatan kenyamanan dan keamanan setelah adanya perbaikan infrastruktur dan lingkungan tempat tinggal.

Lebih jauh lagi, manfaat pribadi masyarakat juga mencakup peningkatan relasi dan rasa keterhubungan antarmasyarakat. Aktivitas rutin seperti kerja bakti tidak hanya memperbaiki kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memperdekat hubungan antartetangga. Banyak masyarakat yang sebelumnya jarang berinteraksi kini mulai merasa lebih akrab dan saling mendukung. Penguatan jaringan sosial di tingkat pribadi ini memiliki dampak signifikan terhadap ketahanan masyarakat, karena jaringan sosial yang kuat dapat mempercepat penyebaran informasi, memperluas akses bantuan, serta mengurangi beban psikologis saat bencana. Selain itu, bantuan relokasi dan perbaikan rumah bagi masyarakat yang terdampak memberikan rasa aman secara personal yang sangat penting untuk pemulihan mental

pascabencana. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat pribadi tidak hanya terletak pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada rasa aman, kenyamanan, dan dukungan emosional yang muncul dari interaksi sosial yang semakin erat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi dan penanggulangan bencana longsor di Kelurahan Manggau memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Manfaat secara materi berperan besar dalam pemulihan kebutuhan dasar dan infrastruktur, manfaat sosial memperkuat solidaritas dan keharmonisan masyarakat, dan manfaat pribadi meningkatkan kesiapsiagaan, kenyamanan, serta hubungan personal masyarakat. Namun demikian, pada penelitian ini juga mendapatkan bahwa meskipun manfaat sosial dan pribadi cukup signifikan, peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan simulasi kebencanaan masih sangat diperlukan. Oleh karena itu, agar manfaat yang diterima masyarakat semakin optimal, diperlukan penguatan program-program peningkatan kapasitas yang bersifat praktis dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana dapat berkembang dari sekedar penerima manfaat menjadi aktor utama dalam membangun ketangguhan wilayah.

4. Partisipasi Dalam Evaluasi

Partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi kegiatan mitigasi bencana memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Manggau tidak hanya terlibat sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penilai yang memberikan umpan balik terhadap keberhasilan maupun kekurangan dari berbagai program mitigasi. Keterlibatan ini sejalan dengan pandangan bahwa evaluasi partisipatif mendorong masyarakat untuk memiliki rasa kepemilikan terhadap kegiatan yang dijalankan, sehingga hasil evaluasi tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga menjadi proses pembelajaran yang menguatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini terlihat dari pandangan masyarakat bahwa evaluasi bukanlah proses menghakimi, melainkan sarana memperbaiki kualitas program secara berkelanjutan.

Dalam evaluasi terhadap kegiatan penanaman pohon, masyarakat menyoroti pentingnya pendampingan dan perawatan jangka panjang. Meskipun kegiatan penghijauan telah terlaksana dengan melibatkan masyarakat dan mahasiswa, evaluasi menunjukkan bahwa banyak bibit yang mati akibat kurangnya perawatan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu program mitigasi tidak hanya bergantung pada pelaksanaannya, tetapi juga tindak lanjut yang berkelanjutan. Pandangan masyarakat menunjukkan bahwa program penghijauan perlu dikembangkan tidak hanya sebagai kegiatan simbolis, tetapi sebagai strategi yang terencana dengan baik. Dengan demikian, evaluasi masyarakat memberikan wahana untuk memahami bahwa keberhasilan mitigasi bencana memerlukan kesinambungan antara pelaksanaan kegiatan dan pemeliharaan setelahnya, serta penyediaan mekanisme yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam perawatan lingkungan secara rutin.

Evaluasi masyarakat juga tampak kuat dalam menilai rencana relokasi yang diusulkan pemerintah. Masyarakat mengekspresikan dilema antara kebutuhan akan tempat tinggal yang lebih aman dan keterikatan terhadap lahan serta sumber mata pencaharian yang telah diwariskan secara turun-temurun. Evaluasi ini menunjukkan bahwa relokasi tidak dapat diputuskan secara sepihak karena menyangkut aspek sosial-ekonomi masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam menilai kesiapan relokasi menjadi kunci dalam menghasilkan keputusan yang adil dan dapat diterima. Selain itu, masyarakat menegaskan bahwa proses relokasi harus melibatkan mereka secara menyeluruh, termasuk dalam memilih lokasi, menilai fasilitas, serta merencanakan adaptasi hidup pasca-relokasi. Evaluasi ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan relokasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan lokasi baru, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan dan kesiapan masyarakat untuk memulai kehidupan di lingkungan yang baru.

Aspek lain juga menjadi perhatian dalam evaluasi masyarakat adalah efektivitas sosialisasi kebencanaan. Masyarakat menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya efektif karena tidak dilakukan secara berkala, kurang melibatkan seluruh kelompok masyarakat, serta tidak dibarengi dengan pelatihan praktis. Masyarakat merasa bahwa pemahaman mereka terhadap tanda-tanda bencana dan prosedur evakuasi masih terbatas sehingga potensi kepanikan tetap tinggi pada saat bencana terjadi. Evaluasi ini menegaskan bahwa strategi komunikasi pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi sosial serta kebutuhan kelompok masyarakat. Pelatihan rutin dan simulasi bencana dinilai penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, evaluasi masyarakat tidak hanya menyoroti kekurangan, tetapi juga memberikan arah yang jelas untuk peningkatan kualitas sosialisasi kebencanaan.

Kegiatan pembersihan jalan dan kerja bakti rutin juga menjadi bagian dari evaluasi masyarakat. Mereka menilai bahwa kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi stabilitas lingkungan dan pencegahan longsor, namun tetap membutuhkan dukungan peralatan dari pemerintah agar pelaksanaannya lebih optimal. Evaluasi masyarakat terhadap kegiatan evakuasi juga menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki solidaritas tinggi dan mampu bergerak cepat dalam menolong korban, mereka masih membutuhkan pelatihan teknis agar penanganan bencana lebih terkoordinasi. Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan yang kuat dalam mengidentifikasi keberhasilan kegiatan sekaligus kebutuhan peningkatan kapasitas. Secara keseluruhan, evaluasi partisipatif yang dilakukan masyarakat mencerminkan bahwa keberhasilan mitigasi bencana tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis, tetapi juga oleh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Dengan memasukkan pendapat masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan, strategi mitigasi longsor di Kelurahan Manggau dapat menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait mitigasi bencana di Kelurahan Manggau masih sangat rendah. Keputusan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah maupun instansi yang terkait, sementara masyarakat hanya dilibatkan setelah keputusan ditetapkan. Rendahnya partisipasi ini disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang mekanisme partisipasi, minimnya sosialisasi, serta budaya pengambilan keputusan yang masih bersifat *top-down*. Hal ini menyebabkan masyarakat belum memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan dan kebutuhan mereka sebelum suatu program dijalankan.

Partisipasi masyarakat dalam implementasi merupakan bentuk partisipasi yang paling dominan. Masyarakat terlibat aktif dalam berbagai aktivitas seperti kerja bakti, evakuasi korban, perbaikan jalan, pembukaan akses, serta penanaman pohon. Mereka memberikan tenaga, waktu, dan dukungan sosial secara sukarela. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa kapasitas sosial masyarakat tinggi, meskipun kegiatan tetap dipimpin oleh pemerintah maupun instansi yang terkait. Namun, partisipasi ini masih bersifat spontan dan belum didukung oleh pelatihan teknis yang memadai.

Masyarakat menerima manfaat dari mitigasi bencana baik dari segi materi, sosial, maupun pribadi. Manfaat materi berupa bantuan logistik, tenda pengungsian, obat-obatan, serta bantuan evakuasi. Manfaat sosial terlihat dari meningkatnya solidaritas, hubungan antarmasyarakat yang lebih erat, serta meningkatnya rasa kepemilikan terhadap lingkungan. Sementara manfaat pribadi berupa peningkatan pengetahuan dasar tentang kebencanaan dan kepercayaan diri dalam menghadapi potensi longsor. Meski demikian, belum adanya pelatihan dan simulasi membuat manfaat pengetahuan masyarakat belum sepenuhnya maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi berjalan relatif baik. Masyarakat menunjukkan sikap kritis terhadap efektivitas kegiatan mitigasi, seperti penanaman pohon yang kurang terpantau, keterbatasan sosialisasi, belum adanya simulasi evakuasi, serta perlunya pendampingan rencana relokasi. Namun, hasil evaluasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar perubahan kebijakan, sehingga hubungan antara masukan masyarakat dan tindak lanjut pemerintah belum optimal. Meski demikian, tingginya partisipasi evaluatif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang kuat mengenai pentingnya meningkatkan kesiapsiagaan bencana.

REFERENSI

- Astuti, S. P., Setiawan, E. B., & Setyaningrum, I. (2023). Pendidikan Dasar Bencana Bagi Pemuda Untuk Meningkatkan Kesadaran Akan Bencana. *Transformasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 19(1), 1–12. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v19i1.4971>
- Capital, E. B. (n.d.). *Public Trust in Productive Economic Business Capital Assistance Program in Manggalung Village*.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches+ a crash course in statistics*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dera, M. (2025). Literature Review: Pengaruh Pendidikan Mitigasi Bencana Terhadap Kesiapsiagaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Jka (Jurnal Kesehatan Aeromedika)*, 11(1), 45–48. <https://doi.org/10.58550/jka.v11i1.306>
- Efendi, M., Nasruddin, N., & Karani, S. (2022). Sekolah Terhadap Masyarakat Pembelajar Tangguh Bencana Di Lingkungan Lahan Basah. *Jpig (Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Geografi)*, 7(2), 97–109. <https://doi.org/10.21067/jpig.v7i2.7339>
- Fauziyah, U., & Kriswibowo, A. (2023). Penerapan Community Based Mitigation Dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir Di Desa Lundo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 10(1). <https://doi.org/10.20527/jpg.v10i1.14213>
- Ibrahim, I., Pratama, I. N., & Zitri, I. (2024). Pelatihan Penguatan Kapasitas Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana Di Desa Rembitan. *Jurdimas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Royal*, 7(3), 485–492. <https://doi.org/10.33330/jurdimas.v7i3.3348>
- IDEP. (2007). Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat. In *Bali: Yayasan IDEP*.
- Jefri, J., Purnawati, L., Ali, S., Qolbi, Y., & Hastira, M. F. (2025). Assessing Drought Risks and Implementing Effective Mitigation Strategies to Enhance Resilience in Nunukan Regency, North Kalimantan, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (Jisip)*, 14(1), 202–222. <https://doi.org/10.33366/jisip.v14i1.2984>
- Lestari, I., Abdullah, M. T., Hasniati, H., & Nara, N. (2025). Enhancing public Services through Agile Governance: A case study of the online queue application at RSUD Sawerigading Palopo city. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1466–1472.
- Maulana, A., Rahman, A., Aulia, N. A., Nur, A., Firmansyah, M., & Gunawan, B. A. (2024). PARADIGMA PENANGGULANGAN BENCANA: TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DAN MITIGASI BERBASIS KEARIFAN LOKAL. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 667–677.
- Nadila, S. M., & Ratri, A. M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Adaptasi Bencana Di Kabupaten Padang Pariaman. *Share Social Work Journal*, 10(1), 11. <https://doi.org/10.24198/share.v10i1.23707>
- Nkombi, Z., & Wentink, G. (2022). The Role of Public Participation in Disaster Risk

- Reduction Initiatives: The Case of Katlehong Township. *Jàmbá Journal of Disaster Risk Studies*, 14(1). <https://doi.org/10.4102/jamba.v14i1.1203>
- Pemprov Sulawesi Selatan. (2019). *Kabupaten Tana Torja*. Provinsi Sulawesi Selatan.
- Peraturan Bupati Tana Toraja. (2016). *Peraturan Bupati Tana Toraja No. 62 Tahun 2016 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tana Toraja*. JDIH BPK.
- Putri, D. E. (2023). Kesiapsiagaan Masyarakat Surabaya Terhadap Potensi Bencana Ditinjau Dari Teori Konstruksi Sosial. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(1), 278–285. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4437>
- Rahman, A. Z. (2015). Kajian mitigasi bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. *Gema Publica*, 1(1), 1–14.
- Rohmah, A. N., Defitri, S. A., Nurhidayah, N., Rizkiani, F., Lestari, E. P., Anggraeni, N. A. D., Erhandi, T., Banjari, M. A. S. Z. A., Situmorang, L., & Jamal, M. (2023). Pendekatan Komunikasi Partisipatif Dalam Pelatihan Kelana Untuk Membentuk Masyarakat Tangguh Bencana. *Plakat Jurnal Pelayanan Kepada Masyarakat*, 5(1), 90. <https://doi.org/10.30872/plakat.v5i1.12489>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Bandung: Alfabeta*.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat Eksploratif, Interpretif, interaktif, dan konstruktif*. Bandung: Alfabeta.
- Ulum, S., & Dewi, S. A. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Gamplong. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 14–24.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2007. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana